



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS SEBELAS MARET

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HARTONO
2. Jabatan : DIREKTUR
3. NHK : 196869

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.250.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 195 m2/249 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 159 m2/140 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , WARISAN Rp. 700.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 600 m2/600 m2 di KAB / KOTA KARANGANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 190.000.000

1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
2. MOBIL, SUZUKI KATANA Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 160.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 406.628.223

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 4.006.628.223

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 4.006.628.223

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.